



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01/PansusII/XI/2022 tanggal 30 November 2022 hal Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, perlu pemberian perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 6 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

6 JAN 2023



WAKIL KETUA,

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
 8. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023.

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bupati	Baru	Triwulan I	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	1. penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pendidikan, rekreasi, pelestarian kearifan lokal dan pusat belajar sepanjang hayat; 2. akses informasi layak anak; 3. taman literasi dan pusat kreativitas anak; 4. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) didukung dengan adanya perpustakaan digital untuk menuju Bantul Pinter (BANTER); 5. penyelamatan Naskah Kuno; 6. inklusi sosial; dan 7. inovasi.	DPRD (Komisi D)	Perubahan	Triwulan I	

11/2017

PP 18/2017

3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah	Pokok-pokok perubahan antara lain mengenai: persyaratan calon Lurah, mekanisme seleksi untuk calon Lurah yang lebih dari 5 (lima), cuti calon lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan, perlunya diatur Panitia Pengawas Pemilihan Lurah, ketentuan Pemberhentian Lurah.	Bupati	Perubahan	Triwulan I	
4.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa	Sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan Kalurahan, Pengaturan tidak diamanatkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah dan lebih efektif apabila diatur dalam Peraturan Bupati.	DPRD (Bapemperda)	Baru	Triwulan I	

5.	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Bupati	Baru	Triwulan I	Rancangan Peraturan Daerah yang belum terselesaikan dalam pembahasan pada Tahun 2022
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Perubahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	DPRD (Komisi B)	Perubahan	Triwulan II	
7.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD (Komisi C)	Baru	Triwulan II	
8.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	DPRD (Komisi A)	Baru	Triwulan II	

9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Pokok-pokok perubahan mengenai mutasi Pamong Kalurahan, persyaratan calon Pamong Kalurahan, seleksi Pamong Kalurahan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Pamong Kalurahan	Bupati	Perubahan	Triwulan II	
10.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Baru	Triwulan II	
11.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Bupati	Baru	Triwulan III	
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	APBD Murni Tahun Anggaran 2024	Bupati	Baru	Triwulan IV	


 WAKIL KETUA,

 SUBHAN NAWWAWI